

KABINET PRABOWO RASA JOKOWI

Ada Menteri Lama, Ketum Parpol hingga Kader PDIP

Sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpeluang besar menjabat menteri lagi dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Diketahui, memang ada sejumlah menteri yang menyokong Prabowo dalam kontestasi politik untuk memperebutkan kursi RI 1. Selain itu, alasan kuat lain adalah agar proses transisi pemerintahan berjalan lancar. Kabar lain yang beredar, Parbowo membuka peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masuk pemerintahan selanjutnya. Ada nama Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara dan Abdullah Azwar Anas Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kader partai Banteng yang menguat. Selain itu spekulasi lain yang berembus kencang adalah menteri-menteri ekonominya masih wajah lama. Sebab dinilai sebagai kunci agar pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 7% hingga 8%.

Baca Hal 11....

Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo



1. Nusron Wahid

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, menjadi salah satu nama baru yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namanya muncul di bursa calon menteri usai disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini.



2. Meutya Hafid

Kader Golkar Meutya Hafid diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Meutya sebelumnya menjabat Ketua Komisi I DPR, mitra Kementerian Pertahanan.



3. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo setelah Hashim Djojohadikusumo menyebut rencana empat jabatan menteri untuk lulusan SMA Taruna Nusantara.



4. Budi Gunawan

Nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan juga muncul sebagai calon menteri. Hal ini seiring Prabowo yang disebutkan sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.



5. Abdullah Azwar Anas

Pada isu calon menteri yang beredar, ada nama Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia merupakan kader PDIP.



6. Sugiono

Sugiono, Wakil Ketua Harian Partai Gerindra, dikabarkan disiapkan sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Prabowo. Ia adalah mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Letnan Satu.



7. Sjafrie Sjamsoeddin

Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini diusulkan sebagai Menteri Pertahanan 2024-2029 dan telah menjabat Asisten Khusus Menteri Pertahanan sejak 6 Desember 2019.



8. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, berpeluang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah sebelumnya menjabat Menteri ESDM.



9. Raja Juli Antoni

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, diusulkan Jokowi untuk masuk kabinet Prabowo sebagai Menteri Kesehatan. Saat ini, ia menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.



10. Pratikno

Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, diusulkan Jokowi untuk tetap di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia.

**Government (Hal.2)
Bank Dunia Sebut
Ekonomi Indonesia
Pulih Lebih Cepat,
Tapi Kelas Menengah
Rentan**



11. Budi Arie Setiadi

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi diusulkan Jokowi sebagai calon menteri di Kabinet Prabowo dan kabarnya akan menjabat sebagai Menteri Desa.



12. Listyo Sigit Prabowo

Nama terakhir yang dikabarkan diusulkan Jokowi untuk menjadi menteri Prabowo adalah Listyo Sigit Prabowo untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri.



KABINET PRABOWO

Bank Dunia Sebut Ekonomi Indonesia Pulih Lebih Cepat, Tapi Kelas Menengah Rentan

JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) memperkirakan di antara negara-negara besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik, hanya Indonesia mampu tumbuh di tahun 2024 dan 2025. Pertumbuhannya juga diprediksi bakal mentereng yaitu di atas tingkat sebelum pandemi COVID-19.

Meski optimistis, Bank Dunia tetap mengingatkan ada kerentanan. Untuk jangka menengah dan panjang, kondisi industri manufaktur dan perdagangan Indonesia jadi sorotan.

Sektor ini dinilai masih kurang berdaya saing dibandingkan dengan negara lain di kawasan. Dampaknya panjang terhadap 'middle income trap'.

"Di antara negara-negara yang lebih besar, hanya Indonesia yang diperkirakan tumbuh di tahun 2024 dan 2025 pada atau di atas tingkat sebelum pandemi, sementara pertumbuhan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan berada di bawah tingkat tersebut," kata World Bank East Asia and Pacific Chief Economist, Aaditya Mattoo, dikutip Rabu (9/10/2024).

Hal tersebut diungkapkan dalam Laporan Bank Dunia untuk Update Ekonomi Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2024 (World Bank East Asia and The Pacific Economic Update October 2024) yang dirilis hari ini.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2024 dan 5,1 persen pada 2025. Sementara, rata-rata pertumbuhan Indonesia pada periode 2015-2019 tercatat sebesar 5 persen.

Proyeksi pertumbuhan Indonesia dalam laporan edisi Oktober 2024 tersebut direvisi naik dibandingkan pada perkiraan dalam Laporan Update Ekonomi Asia Timur dan Pasifik edisi April 2024, yang sebesar 4,9 persen pada 2024 dan 5 persen pada 2025.

Perekonomian Indonesia ke depan akan mendapatkan manfaat antara lain dari peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi serta belanja pemerintah.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan wilayah Asia Timur dan Pasifik sebesar 4,8 persen pada 2024, melambat menjadi 4,4 persen pada 2025.

Pertumbuhan di Tiongkok, ekonomi terbesar di kawasan tersebut, diproyeksikan menurun dari 4,8 persen tahun ini menjadi 4,3 persen pada 2025, karena menghadapi pelemahan pasar properti yang terus-menerus, rendahnya kepercayaan konsumen dan investor, serta tantangan struktural seperti penuaan penduduk dan ketegangan global.

Sementara pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik tidak termasuk Tiongkok diproyeksikan meningkat dari 4,7 persen pada 2024 menjadi 4,9 persen pada 2025, ditopang oleh



(Ilustrasi) UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia usai pandemi COVID-19. Tampak lekerja merapikan kerupuk yang akan dijemur di sentra UMKM Mandiri di Kampung Pekarungan, Serang, Banten. (Dok.Ant)

peningkatan konsumsi domestik, pemulihan ekspor barang, dan kebangkitan pariwisata.

Lebih lanjut dalam proyeksi Bank Dunia, Malaysia tumbuh 4,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025, Filipina tumbuh 6 persen pada 2024 dan 6,1 persen pada 2025, Thailand tumbuh 2,4 persen pada 2024 dan 3 persen pada 2025, Vietnam tumbuh 6,1 persen pada 2024 dan 6,5 persen pada 2025.

Selanjutnya, Kamboja diperkirakan tumbuh 5,3 persen pada 2024 dan 5,5 persen pada 2025, Laos diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan 4,1 persen pada 2024 dan 3,7 persen pada 2025, sedangkan Myanmar diprediksi tumbuh 1 persen baik pada 2024 maupun 2025.

Negara-negara Kepulauan Pasifik diproyeksikan tumbuh sebesar 3,5 persen pada 2024 dan 3,4 persen pada 2025, seiring pulihnya sektor pariwisata. Pertumbuhan investasi masih lemah di sebagian besar wilayah tersebut.

Harus Tumbuh di Atas 6%

Terpisah, Kementerian Keuangan mengungkapkan sederet tantangan Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap dan mencapai Indonesia Emas 2045. Adapun salah satu hal yang menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target itu ialah menggeber pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono mengatakan, Indonesia masih akan dihadapkan dengan tantangan yang berasal dari lingkup global. Hal ini utamanya terkait ketegangan geopolitik global.

"Meningkatnya ketegangan negeri politik di beberapa wilayah global, di Ukraina, kemudian juga di Timur Tengah, telah menambah kerentanan rantai pasok global dan juga tensi ini mendorong terbentuknya blok-blok ekonomi yang berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan yang berbeda-beda antar wilayah dan mempengaruhi fragmentasi ekonomi,"

kata Parjiono, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di tengah prospek pertumbuhan yang lemah, Parjiono mengatakan, wilayah India lalu Asia Tenggara seperti Vietnam, menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat. Sementara Eropa masih mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan akan sedikit melambat.

Meskipun pelanggaran moneter negara maju telah dimulai, menurut Parjiono, inflasi di sektor jasa tetap tinggi yang dapat menghambat upaya pengendalian inflasi global dan menambah kompleksitas dalam normalisasi kebijakan moneter ke depan.

"Ketegangan perdagangan juga masih tinggi, sementara ketidakpastian semakin meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan pemilihan umum di Amerika Serikat yang langsung pada bulan November tahun ini," ujarnya.

Purchase Manager's Index (PMI) manufaktur global juga turun menjadi 48,8 pada bulan September, menandakan kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Zona Zurich khususnya Jerman mengalami penurunan produksi yang paling signifikan, sementara produksi di AS terus menyusut. Di China daratan produksi stagnan selama 3 bulan, dengan pertumbuhan melambat di seluruh Asia.

"Kalau kita lihat perekonomian Indonesia di tengah perekonomian global yang stagnan menunjukkan ketahanan dan kekuatan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 tahun ini mencatat 5,05% year on year yang di dorong oleh permintaan domestik yang kuat, peningkatan kinerja ekspor dan tingkat inflasi yang terjaga," kata dia.

Meski mencatatkan pondasi ekonomi yang kuat, namun pertumbuhan ekonomi 5% telah dicatatkan Indonesia dalam dua dekade terakhir. Oleh sebab itu, Parjiono menilai Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan baru untuk bisa keluar dari middle income trap.

BEBERAPA POIN LAPORAN BANK DUNIA EDISI OKTOBER 2024

Pertumbuhan Ekonomi RI dan Negara Sekitar

-  **INDONESIA** tumbuh 5 persen pada 2024 dan 5,1 persen pada 2025.
-  **MALAYSIA** tumbuh 4,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025
-  **FILIPINA** tumbuh 6 persen pada 2024 dan 6,1 persen pada 2025
-  **THAILAND** tumbuh 2,4 persen pada 2024 dan 3 persen pada 2025
-  **VIETNAM** tumbuh 6,1 persen pada 2024 dan 6,5 persen pada 2025.
-  **KAMBOJA** diperkirakan tumbuh 5,3 persen pada 2024 dan 5,5 persen pada 2025
-  **LAOS** diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan 4,1 persen pada 2024 dan 3,7 persen pada 2025,
-  **MYANMAR** diprediksi tumbuh 1 persen baik pada 2024 maupun 2025.

Wilayah Lainnya

- Pertumbuhan wilayah Asia Timur dan Pasifik sebesar 4,8 persen pada 2024, melambat menjadi 4,4 persen pada 2025.
- Pertumbuhan di Tiongkok, ekonomi terbesar di kawasan tersebut, diproyeksikan menurun dari 4,8 persen tahun ini menjadi 4,3 persen pada 2025
- Pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik tidak termasuk Tiongkok diproyeksikan meningkat dari 4,7 persen pada 2024 menjadi 4,9 persen pada 2025
- Negara-negara Kepulauan Pasifik diproyeksikan tumbuh sebesar 3,5 persen pada 2024 dan 3,4 persen pada 2025.

"Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6% per tahun dan tentunya kita Indonesia perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan yang baru karena 5% ini sudah 2 dekade," ujar Parjiono.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi segera yang diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi demi mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. (wid, rla, ist, ant/dya)

DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat, Seberapa Penting?

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memiliki Badan Aspirasi Rakyat yang menjadi wadah bagi anggota Dewan untuk menampung aspirasi masyarakat. Badan ini merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru yang akan dibentuk pada periode 2024-2029.

"DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kita akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti," ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan pada Rabu (9/10/2024).

Cucun menjelaskan, salah satu fungsi Badan Aspirasi Rakyat adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta. Badan ini akan menjadi pihak yang menerima perwakilan masyarakat yang berdemo, mengingat penanganan unjuk rasa dari internal DPR selama ini masih kurang terstruktur.

"Jadi justru kita DPR menerimanya, betul-betul ini bagian dari rumah rakyat. Jangan sampai seolah selama ini demo tidak diterima oleh DPR. Dan kalau demo, ya jangan sampai diterima secara sporadis. Sehingga ada badan yang menangani khusus," kata Cucun.

Selain itu, Badan Aspirasi Rakyat akan memfasilitasi harapan rakyat soal proses legislasi, penganggaran, pengawasan terhadap undang-undang (UU) dan program pemerintah, hingga diplomasi Parlemen.

"Bukan hanya terkait demonstrasi, misalkan ada keluhan di bawah seperti korban mafia tanah, korban pinjol, korban judol, atau lainnya seperti korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, Badan Aspirasi Rakyat akan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada setiap komisi DPR sesuai dengan bidang kerja dan isu yang diangkat. Masing-masing komisi kemudian akan membawa aspirasi tersebut dalam rapat kerja dengan pemerintah (kementerian/lembaga) untuk mencari solusi.

"Kalau soal hukum akan dikasih ke Komisi III, kalau soal pemerintahan ya kita masukkan ke Komisi II. Misalkan soal pekerja migran Indonesia yang ada masalah, keluarganya mengadu berapa tahun tidak bisa bertemu, kita kasih ke Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan, silakan tangani," papar Cucun.

Cucun menambahkan, meskipun DPR selama ini sudah membuka ruang pengaduan melalui surat, email, dan saluran lainnya, mereka ingin penanganan pengaduan lebih optimal dengan dibentuknya badan ini.

"Kalau misalnya masuk surat lewat email atau kotak surat DPR, tapi



(Ilustrasi) Petugas PPSU membersihkan coretan yang mengotori pembatas jalan pascaunjuk rasa di kawasan DPR/MPR, Jakarta. (dok.ist)

apakah suratnya ini sampai ke orang alamat yang benar atau AKD yang benar yang menanganinya. Ini yang mau kami optimalkan, jadi terstruktur akan disampaikan sesuai dengan AKD terkait," terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini menyatakan, pengaduan masyarakat tidak hanya akan disampaikan ke AKD, tetapi juga akan disalurkan kepada fraksi-fraksi di DPR. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pihak yang melakukan pengawasan terhadap aspirasi rakyat.

"Jadi fraksi juga paham apa yang menjadi aspirasi rakyat itu," sebut Cucun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco Ahmad juga mengonfirmasi bahwa akan ada AKD baru, yakni Badan Aspirasi Rakyat. Menurut Dasco, keputusan final mengenai jumlah AKD di DPR RI masih dalam kajian dan akan dimatangkan dalam rapat pimpinan fraksi pada 14 Oktober mendatang. "Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu Badan Aspirasi Rakyat," kata Dasco

Ada 13 Komisi

Di sisi lain, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR RI telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menyesuaikan dengan pos-pos kementerian pemerintahan mendatang menjadi 13 komisi dan adanya badan baru yang akan dibentuk.

"Untuk komisi, DPR menyepakati menjadi 13 (komisi) dari awalnya 11 (komisi). Kemudian ada juga penambahan badan di DPR," kata Cucun dalam keterangannya.

Adapun, kata dia, badan di DPR RI yang eksis saat ini, yaitu Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Sudah dicatat juga dalam UU

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kemarin terkait penambahan jumlah menteri ini, baik nanti kementerannya kemudian juga supporting anggaran DPR melalui Badan Anggaran sesuai dengan UU APBN, itu nanti dibicarakan bersama antara Pemerintah dengan DPR," tuturnya.

Dia mengatakan pembentukan AKD baru di DPR RI itu dimaksudkan agar kerja-kerja menjadi lebih efektif, menyuladanya rencana penambahan pos kementerian pada pemerintahan mendatang.

"Penambahan akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden baru, Pak Prabowo. Ini supaya tidak terjadi penumpukan, artinya mitra kerjanya, biar efektif itu kami akan lakukan penambahan jumlah komisi," ujarnya.

Dia menyebut DPR RI berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR RI pada 14 Oktober, sebelum masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilangsungkan pada 20 Oktober.

"Pembentukan AKD pasti sebelum tanggal 20 Oktober. Kan akan dikirim juga ke DPR kisi-kisi nomenklatur yang akan dibikin di era kabinetnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nanti tinggal umumkan personalnya siapa saja," ucapnya.

Dia pun membuka peluang kemungkinan adanya peleburan komisi, namun hal tersebut akan disesuaikan dengan pos-pos kementerian kabinet pemerintahan mendatang.

"Bisa jadi nanti akan disesuaikan mana ini yang koor-nya misalkan di polhukam (politik, hukum, dan keamanan), atau koordinator di keuangan, industri dan pembangunan, koor-nya kesejahteraan rakyat mana. Itu akan otomatis nanti yang akan sedikit bersinggungan maka akan disatukan," paparnya.

Dia menambahkan bahwa DPR RI selama ini telah menata AKD sebaik mungkin sehingga kerja-kerja legislasi, penganggaran, dan peng-

awasan bersama mitra pemerintahan telah berjalan efektif dan optimal demi kepentingan rakyat. (wid, rls, ist, ant)

DPR Saat Ini Memiliki 11 Komisi

1. Komisi I

Membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen yang bermitra dengan Kemhan, Kemlu, Kominfo, TNI, BIN.

2. Komisi II

Membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparaturnegara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria. Mitra kerja di antaranya Kemendagri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Staf Presiden, KPU, Bawaslu.

3. Komisi III

Membidangi hukum, HAM, dan keamanan yang bermitra dengan Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, MA, MK, Komnas HAM.

4. Komisi IV

Membidangi pertanian, kehutanan, maritim/kelautan dan perikanan, pangan. Mitra kerja di antaranya Kementan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Badan Restorasi Gambut.

5. Komisi V

Membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Komisi VI

Membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, standarisasi nasional yang bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN, dan lainnya.

7. Komisi VII

Membidangi energi, riset, dan teknologi yang bermitra dengan Kementerian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, SKK Migas, dan sebagainya.

8. Komisi VIII

Membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, haji. Mitra kerja di antaranya Kementerian Agama, Kemensos, Kementerian PPPA, BNPB, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan sebagainya.

9. Komisi IX

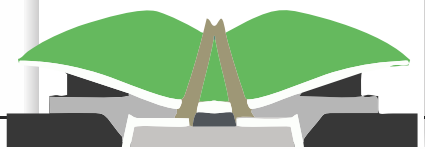
Membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan. Mitra kerja di antaranya Kemkes, BKKBN, BPOM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BPJS, dan lainnya.

10. Komisi X

Membidangi pendidikan, olahraga, sejarah yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek, Kemenparekraf, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sebagainya.

11. Komisi XI

Komisi DPR yang menjadi alat kelengkapan dewan ini membidangi keuangan dan perbankan yang bermitra dengan Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPK, BI, OJK, dan lainnya.



Polda Metro Sudah Periksa 23 Orang terkait Kasus Wakil Ketua KPK Alex Marwata

Kronologi Kasus Alex Marwata

- Bermula saat Eko melakukan flexing atau memamerkan harta kekayaannya dan viral di media sosial pada Februari-Maret 2023.
- Buntutnya, Dirjen Bea Cukai pun mengumumkan Eko Darmanto dicopot dari jabatannya karena melakukan flexing terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023.
- Sejalan dengan proses internal di Ditjen Bea Cukai, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Eko lantas dipanggil oleh KPK untuk memberikan klarifikasi pada 7 Maret 2023.
- Di tengah proses ini, Alex bertemu dengan Eko pada 9 Maret 2023. Alex mengakui pertemuan tersebut. Kata dia, dalam pertemuan itu dirinya didampingi staf dan atas sepengetahuan atasan.
- KPK menetapkan Eko sebagai tersangka kasus gratifikasi pada 18 Desember 2023.
- Kemudian pada 18 April, 2024 ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang sekitar Rp37,7 miliar dari para pengusaha impor ataupun pengusaha pengelolaan jasa kepabeanan (PPJK) hingga pengusaha barang kena cukai.
- Alex lantas dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 23 Maret 2024. Dari laporan itu, polisi telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Springas pada tanggal 5 April 2024 dan telah diperbarui atau diperpanjang pada tanggal 9 September 2024.



JAKARTA-Sebanyak 23 orang telah diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait pertemuan antara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dengan Eks Kepala Bea Cukai DIY yang baru-baru ini ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, Eko Darmanto.



(Kolase) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kiri) dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

"Sampai dengan saat ini telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan oleh Tim Penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrim Polda Metro Jaya terhadap 23 orang dalam penanganan perkara a quo," kata Dirreksrimus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, melalui keterangan yang diterima pada Rabu (9/10/2024).

Ade menyebut pihak yang diminta keterangan di antaranya Eko Darmanto, beberapa pegawai di KPK, hingga Itjen Kementerian Keuangan RI. Selain itu, polisi juga sudah memintai keterangan dari ahli hukum pidana dan ahli hukum acara pidana.

"Saat ini untuk upaya penyelidikan masih terus berlangsung, dengan melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap para saksi lainnya," ucap dia.

Kasus ini mulai ramai ketika Eko memamerkan harta kekayaannya pada rentang bulan Februari-Maret 2023 silam. Eko kemudian dicopot dari jabatannya dan KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap Eko terkait dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pemeriksaan dilakukan karena profil yang ditampilkan dalam LHKPN dinilai tak sesuai dengan harta yang dipamerkan oleh Eko. Dalam LHKPN, Eko mempunyai kekayaan senilai Rp 15,7 miliar. Eko pun diminta klarifikasi oleh KPK pada Maret 2023.

Di sela permintaan klarifikasi yang dilakukan, Alex bertemu dengan Eko. Pertemuan dengan Eko pun sudah diakui oleh Alex. Pertemuan itu mulanya diinisiasi oleh Eko yang mencari perlindungan karena sedang ramai kasus yang menimpa Rafael Alun.

Polisi sudah memeriksa mantan Eko Darmanto terkait pertemuannya dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwat dua kali. 'Saudara Eko Darmanto, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, sudah dilakukan

klarifikasi sebanyak dua kali," katanya.

Alex dan Eko yang merupakan alumni STAN bertemu di Gedung KPK ketika Eko sedang menjalani permintaan klarifikasi. Eko melalui pintu belakang sehingga dapat mengakses lift pimpinan KPK.

Dalam keterangannya, Alex sempat menyebut bahwa pertemuan tersebut terjadi sebelum KPK menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan. Alex juga menyebut bahwa pertemuan tersebut untuk melaporkan penyalahgunaan kewenangan atau kasus korupsi di tubuh Bea Cukai.

Namun, Alex seakan tak mengindahkan Eko yang berpotensi menjadi pihak yang berperkara di KPK. Setelah pertemuan di Gedung KPK, Alex dan Eko terus berkomunikasi hingga menjelang penatapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Adapun Eko telah divonis 6 tahun penjara terkait kasus gratifikasi. Selain itu, Eko juga dijatuhkan denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Tongani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (27/8/2024).

Eko dianggap secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Komisioner KPK Lain Diklaim Tahu

Alexander Marwata, menegaskan pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Penegasan dilakukan, menjelang

pemeriksaan Alex oleh Polda Metro Jaya, pada 11 Oktober 2024.

"Yang bersangkutan (Eko) saat itu mau bertemu saya, bertindak sebagai pelapor perkara dugaan korupsi yang terjadi di instansi dia bekerja. Bukan terlapor yang minta perlindungan atas masalah yang bersangkutan yang sedang viral (flexing)," kata Alex melalui keterangan tertulis, Rabu, (9/10/2024).

Alex membantah pertemuan itu dilakukan secara personal. Menurutnya, komunikasi dalam kejadian itu diketahui komisioner KPK lainnya dan dua staf. Dia bingung pertemuan itu dipermasalahkan, padahal sedang menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK.

"Jadi, masalahnya ada di mana?" ujar Alex.

Dia juga tidak mengetahui kronologi Eko masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Mantan pejabat Bea Cukai Yogyakarta itu dikabarkan dapat akses pintu belakang markas Lembaga Antirasuah.

"Bisa jadi karena yang bersangkutan mau bertemu pimpinan, kemudian diarahkan (pegawai KPK) ke sana (pintu belakang)," ucap Alex.

Alex juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Eko. Bahkan, kata dia, wajah mantan pejabat itu baru dilihatnya saat membuat laporan.

"Saya tidak mengenal yang bersangkutan sebelumnya. Saya baru tahu yang bersangkutan ketika bertemu di KPK, dan hanya sekali itu," tegas Alex.

Polda Metro Jaya bakal memeriksa Alex terkait pertemuan dengan Eko pada Jumat, 11 Oktober 2024. Surat panggilan dipastikan sudah dikirimkan.

Mantan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata harus memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

"Asas praduga tidak bersalah kepada Alex tentu harus di-kedepankan namun memastikan KPK bersih dari dugaan perbuatan pidana dan etik tentu juga harus lebih penting," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

"Oleh karena itu, demi marwah lembaga, KPK harus memastikan Alex hadir dan membeastugaskannya dari tugas sehari, hari pada hari Jumat," tambah dia.

Yudi berharap Alexander menyampaikan keterangan dengan jujur untuk memastikan apakah perkara ini bisa naik ke penyidikan atau tidak di Polda Metro Jaya. (ant, wus, rls/dya)

Selegenje! Peraturan KPU soal Larangan Anak di Kampanye Pilkada Berbeda dengan UU

JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meng-ungkap perbedaan aturan teknis yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Undang-undang (UU) nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Anggota Bawaslu, Puadi menjelaskan, Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berbeda dengan UU Pemilu yang notabene menjadi acuan beberapa tahapan pilkada.

"Dalam pelaksanaannya, (kampanye) tidak boleh melibatkan anak. Meskipun dalam UU 10/2016 (tentang Pilkada) dan PKPU 13/2024 (tentang Kampanye Pilkada) tidak diatur larangan kampanye yang melibatkan anak," ujar Puadi, Rabu (9/10/2024).

Puadi juga menegaskan aturan larangan pelibatan anak pada kegiatan politik termasuk kampanye di dalam UU lainnya. Yakni, Pasal 15 huruf a UU 35/2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Kemudian, dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu ditegaskan, bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki hak memilih.

Berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, kualifikasi pemilih adalah WNI yang genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Adapun setiap pelaksana dan/atau tim kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Oleh karena itu, Puadi menegaskan, aturan larangan pelibatan anak dalam kampanye termasuk dalam kegiatan debat calon kepala daerah, seharusnya dipatuhi KPU-KPU di seluruh Indonesia, meskipun di UU Pilkada maupun PKPU 13/2024 tidak ada ketentuan larangan melibatkan anak.

"Sementara yang ada di PKPU adalah aturan mengenai larangan melibatkan anak hanya untuk kampanye di perguruan tinggi," tandas Puadi.

Terbaru, Bawaslu memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta setelah ditemukan ada anak-anak dalam



Pekerja menata logistik untuk Pilkada Kabupaten Malang 2024 di gudang Bulog Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. (dok. Ist)

pelaksanaan debat perdana calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub-cawagub) Jakarta 2024.

Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan, debat pasangan calon kepala daerah merupakan salah satu jenis kampanye, hanya saja difasilitasi oleh negara melalui penyelenggara pemilihan.

"Debat Paslon merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota paling banyak tiga kali," ujar Puadi.

Oleh karena itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu menegaskan, kehadiran anak-anak dalam acara debat perdana pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta berpotensi melanggar UU.

"Terdapat UU Perlindungan anak yang mesti menjadi acuan bagi perlindungan anak agar tidak dieksploitasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye," demikian Puadi.

DKPP Bikin Indeks Kepatuhan Etik

Di sisi. Lain, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupaya meningkatkan kepatuhan etik penyelenggara pemilu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyusun indeks kepatuhan.

"Saat ini DKPP sedang menyusun Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) dan akan launching 24 Oktober 2024," ujar Ketua DKPP, Hedy Lugito, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2024).

Dia menjelaskan, penyusunan IKEPP dilakukan DKPP dengan bekerja sama bersama institusi perguruan tinggi. Salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

"Perjanjian kerja sama dengan

pihak Unsrat sebetulnya tinggal formalitas. Sebab sebelumnya DKPP sudah kerja sama dengan Unsrat karena sudah beberapa kali

melibatkan akademisi Unsrat dalam kajian-kajian di DKPP," jelasnya.

Lebih lanjut, Hedy berharap IKEPP yang disusun sejak 2020 itu dapat menjadi instrumen pengukuran, khususnya untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sebab dia memastikan tujuan dari pembuatan IKEPP adalah untuk mendeteksi kerentanan pelanggaran KEPP yang dilakukan penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

"Persoalan etik saat ini menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya di dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja, tetapi juga etik bernegara dan berbangsa yang menjadi persoalan publik," demikian Hedy. (wid, rls, ant/dya)

Wilayah dengan Calon Tunggal di Pilkada 2024

TINGKAT PROVINSI:

Papua Barat

TINGKAT KAB./KOTA:

Aceh

- Aceh Utara
- Aceh Taming

Sumatera Utara

- Tapanuli Tengah
- Asahan
- Pakpak Bharat
- Serdang Berdagai
- Labuhanbatu Utara
- Nias Utara

Sumatera Barat

- Dharmasraya

Jambi

- Batanghari

Sumatera Selatan

- Ogan Ilir
- Empat Lawang

Bengkulu

- Bengkulu Utara

Lampung

- Lampung Barat
- Lampung Timur
- Tulang Bawang Barat

Kep. Bangka Belitung

- Bangka
- Bangka Selatan
- Kota Pangkal Pinang

Kepulauan Riau

- Bintan

Jawa Barat

- Ciamis

Jawa Tengah

- Banyumas
- Sukoharjo
- Brebes

Jawa Timur

- Trenggalek
- Ngawi
- Gresik
- Kota Pasuruan
- Kota Surabaya

Kalimantan Barat

- Bengkayang

Kalimantan Selatan

- Tanah Bumbu
- Balangan

Kalimantan Timur

- Kota Samarinda

Kalimantan Utara

- Malinau
- Kota Tarakan

Sulawesi Utara

- Kepulauan Siau
- Tagulandang Biaro

Sulawesi Selatan

- Maros

Sulawesi Tenggara

- Muna Barat

Gorontalo

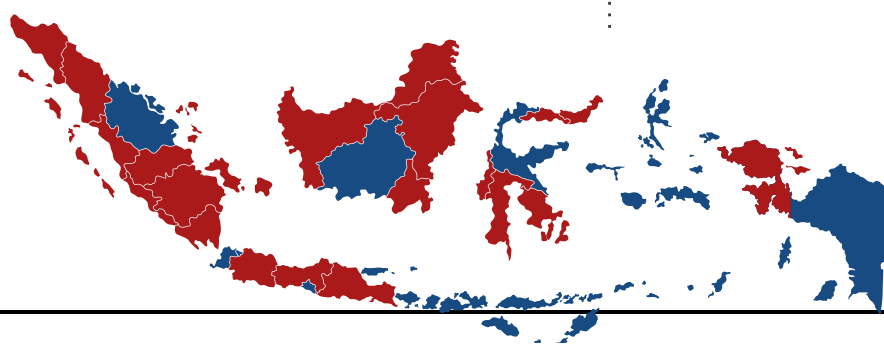
- Puhowato

Sulawesi Barat

- Pasangkayu

Papua Barat

- Manokwari
- Kaimana



Insentif Ketua RT/RW Kabupaten Malang Naik Jai Rp 500 Ribu Plt Bupati: Jika Realisasi PAD 2025 Meningkatkan



Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. (Santi/Lenteratoday)



Ketua RT dan RW adalah garda terdepan dalam administrasi pemerintahan. Mereka menjalankan tugas yang berat, seperti memantau perkembangan ekonomi di tingkat wilayah desa, menjaga ketertiban, dan turut serta dalam program-program pajak desa."

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah merencanakan penambahan insentif bagi Ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan rencana ini wajib terwujud apabila realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 meningkat.

Menurut Didik, kenaikan PAD menjadi syarat utama agar pemerintah dapat mengalokasikan dana insentif untuk para Ketua RT/RW, yang selama ini dinilai memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat paling bawah.

"Ketua RT dan RW adalah garda terdepan dalam administrasi pemerintahan. Mereka menjalankan

tugas yang berat, seperti memantau perkembangan ekonomi di tingkat wilayah desa, menjaga ketertiban, dan turut serta dalam program-program pajak desa," ujar Didik, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Didik menjelaskan peran Ketua RT dan RW di Kabupaten Malang sangat vital dalam memelihara ketertiban sosial serta membantu mempercepat program-program pemerintah.

Menurutnya, ketua RT/RW menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, serta menjadi penghubung yang mengatur jalannya berbagai kegiatan di tingkat desa.

Tugas ini, sambungnya, bahkan tidak hanya dilakukan pada jam kerja saja, tetapi seringkali memerlukan komitmen lebih dari para Ketua RT dan RW, seperti membantu pengurusan administrasi hingga malam hari.

"Misalnya, kalau warga butuh pengurusan surat-surat atau bahkan memberi tanda tangan pada malam hari. Nah ini kan juga tugas beratnya ketua RT/RW," tambah Didik.

Diketahui saat ini, insentif yang

diterima oleh Ketua RT dan RW di Kabupaten Malang yakni sebesar Rp 250.000 per bulan. Angka ini, menurut Didik, masih dirasa sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban.

Oleh karena itu, ditegaskannya, pemerintah Kabupaten Malang berencana meningkatkan insentif tersebut menjadi Rp 500 ribu per bulan. Meskipun angka ini masih perlu disesuaikan dengan kebijakan Bupati terpilih pada periode mendatang.

"Tentu, perubahan besaran insentif ini sangat bergantung pada kebijakan Bupati yang terpilih. Tetapi, yang pasti ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan hak bagi mereka," jelasnya.

Didik juga menyebutkan, insentif bagi Ketua RT dan RW ini, lanjut Didik, akan dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025. "Nanti bisa dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD) di APBD Murni 2025," tukasnya. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Pastikan Petugas TPS Pilkada 2024 Dilindungi BPJS Naker

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus memantapkan persiapan jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Salah satu fokus utama Pemkot yakni memastikan petugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

"Satu contoh di dalam diskusi tadi, yang menjadi fokus kami adalah bagaimana petugas TPS yang bertugas untuk dapat perhatian terkait dengan BPJS ketenagakerjaannya," ujar Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan usai memberikan arahan pada Forum Persiapan Pilkada, Rabu (9/10/2024).

Iwan menjelaskan, saat ini alokasi BPJS Ketenagakerjaan baru diberikan kepada petugas yang berada di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Pemkot Malang melihat perlunya perpanjangan perlindungan ini kepada petugas TPS yang juga berperan vital dalam proses demokrasi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diproses sebagai wujud

pelayanan kita terhadap petugas," tambahnya.

Lebih lanjut, Iwan juga menyampaikan, persiapan Pilkada di Kota Malang ini terus diintensifkan oleh berbagai pihak, termasuk KPU, dan Bawaslu, dengan dukungan penuh dari TNI/Polri.

"Koordinasi ini sangat penting. Kami terus menyampaikan kepada lurah dan camat, yang merupakan ujung tombak di lapangan, untuk selalu siap mendukung kelancaran Pilkada serentak pada 27 November nanti," jelas Iwan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang, Yuyun Nanik Ekowati, menambahkan, mekanisme pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas TPS sedang dalam tahap finalisasi.

Menurut Yuyun, proses tersebut akan mengikuti alokasi anggaran yang telah diberikan kepada KPU Kota Malang.

Yuyun juga menekankan pentingnya pemberian asuransi BPJS Naker ini, dengan berkaca pada pengalaman saat Pileg dan Pilpres



Satu contoh di dalam diskusi tadi, yang menjadi fokus kami adalah bagaimana petugas TPS yang bertugas untuk dapat perhatian terkait dengan BPJS ketenagakerjaannya



Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. (Santi/Lenteratoday)

sebelumnya.

"Kami tidak ingin ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan menimpa petugas di lapangan. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada mereka melalui BPJS adalah prioritas utama, demi kenyamanan dan keamanan selama bertugas," tegas Yuyun.

Sebagai informasi, berdasarkan data KPU Kota Malang, sebanyak 8.316 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilibatkan pada Pilkada 2024. Mereka akan disebar di 1.188 TPS yang berada di seluruh wilayah Kota Malang terhitung sejak 7 November 2024 nanti. (Santi/Dya)

MELLY GOESLAW

Konsisten Tampil Nyentrik Meski jadi Anggota DPR RI

MOMEN pelantikan anggota DPR-RI periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2024) dihiasi pemandangan tak biasa. Musisi Melly Goeslaw untuk pertama kalinya lolos ke Senayan dengan penampilan yang konsisten nyentrik saat pelantikan.

Ia menjadi salah satu dari deretan artis yang mengikuti pelantikan anggota dewan. Wanita yang kerap tampil dengan busana nyentrik itu tampaknya tak ingin kehilangan identitasnya.

Hadir di Gedung Kura-kura sejak pagi hari, Melly Goeslaw kala itu mengenakan kebaya berwarna emas rancangan desainer Margalena, dengan makeup karya Dhirman Putra.

Tak sendirian, Melly Goeslaw didampingi suaminya, Anto Hoed, dan putranya, Anakku Lelaki Hoed atau Ale. Mereka tampak rapi dengan setelan jas warna biru dongker.

"Aku ingin tetap jadi aku. Karena aku senang sama yang nyentrik-nyentrik, jadi ya meski sudah menjadi anggota dewan pun aku akan tetap nyentrik," kata Melly Goeslaw kepada pewarta.

Menuai Pujian Anggota Dewan Lain

Tak disangka, penampilan nyentrik Melly Goeslaw menuai pujian dari anggota dewan lain. Mereka kata Melly bahkan menyarankan dirinya untuk tetap menjadi diri sendiri,

jangan ada yang berubah.

"Mereka menyarankan aku tetap menjadi Melly Goeslaw seperti apa adanya, dan justru hal itu jadi warna lain bagi DPR-RI," kata Melly.

"Aku juga berasa ringan, enggak berasa jadi berat menyanggah gelar dewan," tambahnya.

Tidak Ada yang Baru

Melly Goeslaw mengatakan busana yang ia pakai di hari pelantikan tidak ada yang baru. "Semua yang ada di rumah aja," akunya.

"Dandannya pun enggak lama, kok, karena enggak makeup macam-macam, cuma pakai bedak tabir maskara tipis, alis tipis, lipstik tipis. Dandannya juga di mobil," ungkap penyanyi yang baru saja menggelar konser tunggal di Beach City International Stadium Ancol Jakarta.

Lolos ke Senayan

Melly Goeslaw lolos ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Di Dapil itu ada 123 caleg yang bertarung memperebutkan 7 kursi.

Profil Melly Goeslaw

Melly Goeslaw, putri dari Ersi Sukaesih dan Melky Goeslaw, lahir di Jakarta pada 7 Januari 1974. Ia memulai karier musik profesional pada 1988 dengan album debut

"Pilihanku Deritaku," namun gagal di pasaran. Setelah vakum, Melly kembali bersama grup Potret yang dibentuknya pada 1995 dengan Anto Hoed, yang juga menjadi suaminya. Album debut Potret mencetak hits seperti "Laguku Bahasaku."

Melly dan Anto menikah pada tahun yang sama dan memiliki dua anak, Ale dan Abe. Setelah sukses bersama Potret, Melly kembali bersolo karier pada 1999 dengan album self-titled yang menghasilkan lagu hit "Jika." Ia juga merilis album "Intuisi" pada 2005 dan "Mind Soul" pada 2007.

Selain penyanyi, Melly dikenal sebagai komposer yang sukses menyorbitkan penyanyi baru.

Melly Goeslaw menciptakan banyak hits, termasuk "Menghitung Hari" yang dinyanyikan oleh Krisdayanti dan "Jika" yang dibawakan duetnya dengan Ari Lasso. Ia juga menciptakan lagu "Hati yang Terpilih" untuk Rossa, yang mening-

katkan popularitasnya.

Melly berperan penting dalam membentuk grup BBB (Bukan Bintang Biasa) dengan personel seperti Raffi Ahmad dan Laudya Bella, dan menciptakan lagu "Let's Dance Together" untuk soundtrack film musikal mereka. Bersama suaminya, Anto Hoed, Melly sering berkolaborasi dalam proyek musik, termasuk soundtrack film "Ketika Cinta Bertasbih," yang mendapat apresiasi.

Pada 2009, Melly merilis album mini "GLOW," diikuti dengan soundtrack untuk sinetron dan tiga film pada 2012. Ia

juga meluncurkan album kompilasi "Balance" dan terlibat dalam soundtrack "Ada Apa dengan Cinta? 2" pada 2016. (nei,ist/dya)



Melly Goeslaw pada hari pelantikan anggota DPR-RI periode 2019-2024. (IST)





Risiko Tidur Setelah Makan: Fakta, Fiksi, dan Tips Mengurangnya

GELUTI sambil mengucapkan "Selamat malam" setelah makan adalah kebiasaan yang umum bagi sebagian besar orang. Tidur setelah makan adalah kebiasaan yang umum, tetapi banyak orang khawatir tentang dampaknya bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa fakta dan fiksi tentang tidur setelah makan, serta tips untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Fakta: Tidur Setelah Makan Bisa Menyebabkan Reflux Gastris

Salah satu risiko dari tidur setelah makan adalah gangguan reflux gastris. Ini terjadi karena posisi tidur membuat perut berat, sehingga makanan dan asam lambung dapat naik ke dada dan menyebabkan iritasi pada saluran hati. Selain itu, makanan yang masih hangat dan bercampur dengan asam lambung dapat menyebabkan sensasi panas yang tidak nyaman di dada dan tenggorokan.

Fiksi: Tidur Setelah Makan Akan Membuat Tubuh Menjadi Gemuk

Tidur setelah makan bukan akan langsung membuat tubuh menjadi gemuk. Namun, terkadang kita menyukai makanan yang tidak sehat seperti camilan ringan atau makanan manis setelah makan malam. Jika itu menjadi kebiasaan, maka konsumsi kalori tambahan dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Jadi, risiko tubuh menjadi gemuk disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, bukan

karena tidur setelah makan.

Fakta: Tidur Setelah Makan Dapat Menyebabkan Mual dan Muntah

Tidur setelah makan dapat menyebabkan mual dan muntah, terutama jika Anda tidur dalam posisi yang tidak nyaman. Hal ini disebabkan oleh pergerakan perut yang masih beraktivitas saat tidur, yang dapat menyebabkan makanan keluar dari mulut. Untuk mencegah hal ini, Anda dapat mengatur waktu tidur setelah makan dengan waktu yang cukup, sekitar 1-2 jam.

Fiksi: Tidur Setelah Makan Dapat Menyebabkan Kanker

Tidur setelah makan tidak langsung dapat menyebabkan kanker. Namun, pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker. Misalnya, makan banyak makanan yang tinggi gula dan rendah serat dapat meningkatkan risiko kanker usus besar. Selain itu, pola tidur yang kurang sehat, seperti tidur terlalu sedikit atau terlalu banyak, juga dapat meningkatkan risiko kanker.

Fakta: Tidur Setelah Makan Bisa Menurunkan Kualitas Nafas

Tidur setelah makan dapat menurunkan kualitas nafas karena tubuh yang bekerja keras untuk mengolah makanan yang masih ada di perut. Hal ini dapat menyebabkan batuk atau sesak nafas saat tidur. Untuk mencegah hal ini, Anda dapat

mengatur waktu tidur setelah makan dengan waktu yang cukup, sekitar 1-2 jam.

Fiksi: Tidur Setelah Makan Dapat Menyebabkan Sakit Kepala

Tidur setelah makan bukan akan langsung menyebabkan sakit kepala. Namun, kelelahan dan stress dapat menyebabkan sakit kepala. Jika Anda merasa kelelahan setelah makan, Anda dapat mengatur waktu tidur dengan waktu yang cukup, sekitar 7-8 jam per malam.

Jadi, dari beberapa fakta dan fiksi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidur setelah makan memiliki beberapa risiko, seperti gangguan reflux gastris dan turunnya kualitas nafas. Namun, tidur setelah makan bukan akan langsung menyebabkan tubuh menjadi gemuk atau menyebabkan kanker. Untuk mengurangi risiko tersebut, Anda dapat mengatur waktu tidur setelah makan dengan waktu yang cukup, sekitar 1-2 jam. Selain itu, Anda juga dapat mengatur pola makan dan tidur yang sehat, serta mengurangi stres dan kelelahan.

Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tidur setelah makan, Anda dapat mengikuti beberapa cara menghindari atau mengurangi tidur setelah makan. Berikut ini beberapa cara menghindari tidur setelah makan:

1. Jeda waktu makan dan tidur:

Jeda waktu makan dan tidur minimal 1-2 jam setelah makan. Hal ini

dapat membantu mengurangi risiko gangguan reflux gastris dan turunnya kualitas nafas.

2. Mengurangi konsumsi makanan manis dan lemak:

Mengurangi konsumsi makanan manis dan lemak setelah makan dapat membantu mengurangi risiko gangguan perokohan dan turunnya kualitas tidur.

3. Mengonsumsi makanan ringan:

Mengonsumsi makanan ringan setelah makan dapat membantu mengurangi risiko gangguan reflux gastris dan turunnya kualitas nafas.

4. Mengatur pola tidur yang sehat:

Mengatur pola tidur yang sehat, seperti tidur minimal 7-8 jam per malam dan tidur pada jam yang sama setiap hari, dapat membantu mengurangi risiko gangguan tidur.

5. Mengurangi stres dan kelelahan:

Mengurangi stres dan kelelahan dapat membantu mengurangi risiko gangguan tidur dan gangguan perokohan. Anda dapat mengurangi stres dan kelelahan dengan melakukan olahraga, meditation, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan setelah makan. Dengan mengikuti beberapa cara di atas, Anda dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tidur setelah makan dan memaksimalkan kualitas tidur Anda. (nei,ist/dya)

Huawei Watch GT5 Series Dilego Di Indonesia

HUAWEI baru saja meluncurkan seri smartwatch terbarunya, yaitu Huawei Watch GT5, di Indonesia dengan harga mulai dari Rp3.4 jutaan. Produk ini hadir dengan berbagai fitur canggih dan desain yang stylish, menawarkan pengalaman terbaik bagi pengguna.

Jam tangan pintar ini telah dilengkapi sistem terbaru bernama Huawei TruSense yang mengintegrasikan seluruh sensor pemantau kesehatannya menjadi lebih andal sebagai asisten sehari-hari bagi pengguna.

"Bersama dengan komitmen teknologi yang berkelanjutan, Huawei

akan terus mendukung gaya hidup sehat pengguna melalui pembaruan teknologi yang akan membuat produk-produk kami relevan bagi semua kalangan," kata Country Head of Huawei Device Indonesia Huiler Fan di dalam keterangannya yang diterima, Jumat.

Dalam pengenalannya kepada awak media, Huawei Watch GT5 series dikenalkan terdiri atas Huawei GT5 Pro dan Huawei GT5 yang masing-masing terdiri atas dua ukuran dengan beragam gaya yang disesuaikan.

Huawei GT5 Pro terdiri atas dua ukuran yaitu 46 mm dan 42 mm dengan keduanya masing-masing memiliki

dua strap, sementara Huawei GT5 terdiri atas ukuran 46 mm dengan tiga strap dan 41 mm dengan dua strap.

Salah satu fitur menarik di dalam Huawei Watch GT5 series ialah hadirnya "Wellbeing Assistant" yang ditenagai oleh teknologi terbaru Huawei yaitu Trusense System.

Hal itu merupakan pembaruan dari sensor indikator pendeteksi stres yang sudah ada di Huawei GT Watch series generasi-generasi sebelumnya.

"Wellbeing Assistant" juga dapat menjadi watch face yang diindikasikan dengan ikon panda berbagai ekspresi.

Nantinya sebagai asisten kesehatan emosional, panda itu akan

menampilkan bagaimana emosi yang dirasakan pengguna sepanjang hari mulai dari marah, sedih, senang, hingga stres semuanya dapat terdeteksi dengan harapan pengguna tidak hanya bisa menjaga kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental.

Huawei Watch GT5 series menjadi salah satu smartwatch yang layak dipertimbangkan bagi mereka yang mencari perangkat pintar dengan desain menarik dan fitur lengkap. Dengan peluncuran ini, Huawei menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan inovasi dalam teknologi wearable di Indonesia. (nei,ist/dya)



Tips Memilih Warna Lipstik Sesuai Kulit

Lipstik merupakan salah satu aspek paling menarik pada setiap riasan, maka pemilihan lipstik yang tepat akan membantu mencapai gaya yang diinginkan dan dapat meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri.

Penata rias nasional di House of Beauty Hitesh Dewett berbagi dalam menemukan warna lipstik adalah menentukan warna kulit dan undertone.

Warna kulit mengacu pada warna permukaan kulit, yang dapat berkisar dari cerah, sedang, dan gelap.

“Mengetahui warna kulit membantu Anda memilih warna lipstik yang melengkapi warna kulit Anda. Undertone adalah rona halus di bawah permukaan kulit Anda, yang bisa hangat, dingin, atau netral.

Salah satu cara untuk menentukan undertone Anda adalah dengan melihat urat nadi di pergelangan tangan Anda,” kata Dewett.

Dewett mengatakan jika urat nadi tampak hijau, maka undertone-nya adalah hangat, dan nuansa dengan dasar kuning, oranye atau emas akan paling cocok untuk riasan.

Jika urat nadi tampak biru atau ungu, Anda mungkin memiliki undertone dingin, jadi nuansa dengan undertone biru, ungu atau merah muda adalah yang ideal.

Jika urat nadi memiliki campuran biru dan hijau, maka termasuk undertone netral, yang berarti dapat mengenakan nuansa hangat dan dingin secara efektif.

“Memahami warna kulit dan undertone, dapat dengan mudah membantu Anda memilih warna lipstik yang tepat. Namun, lipstik adalah pilihan yang sangat pribadi, setiap orang menyukai warna sesuai dengan tingkat kenyamanan mereka misalnya bahkan warna kulit yang gelap dapat mengenakan warna bibir merah cerah dengan percaya diri tetapi tidak mudah bagi setiap orang untuk melakukannya,” tambahnya.

Dewett Memberikan Tips Mudah

1. Kulit Cerah

Pilihlah warna lipstik yang menonjolkan warna alami kulit seperti nude dengan sedikit warna merah muda atau persik, koral lembut dan

cokelat lembut. Untuk tampilan lebih berani bisa menggunakan merah ceri atau veri dan merah tua.

2. Kulit Sedang

Kulit Sedang sangat cocok warna seperti merah muda, ungu muda dan beri yang kaya warna cocok untuk meningkatkan kehangatan. Merah anggur dan merah tua juga cocok untuk tampilan lebih bold.

3. Kulit Gelap

Kulit gelap sangat cocok dengan warna lipstik lebih berani dan cerah. Warna gelap seperti beri gelap, plum atau cokelat menciptakan tampilan menonjol, sementara fuchsia, tangerine dan merah klasik menawarkan kontrak yang memukau.

“Jika Anda memiliki bibir kering atau pecah-pecah, gunakan lip scrub diikuti dengan lip balm atau lip oil yang menghidrasi untuk bibir yang halus dan kenyal, lalu gunakan lipstik dengan formula matte atau Anda dapat langsung memilih formula lipstik yang menghidrasi seperti lipstik dengan hasil akhir yang lembut atau satin, dengan aksi ganda, warna dengan kelembapan yang tahan lama,” sarannya.

Tips Lainnya Menentukan Warna Lipstik Sesuai Warna Kulit

1. Kulit Putih

Orang yang berkulit putih termasuk yang bisa memilih warna berwarna nude dan terang. Baebellines bisa menggunakan warna cokelat, merah, merah muda, oranye terang, bahkan emas atau warna lipstik apapun yang diinginkan.

Untuk menambah kesan cantik bibir Baebellines, sebaiknya tambah lapisan glossy pada bibir untuk memberi kesan mengkilap dan lebih sensual. Sebisa mungkin jangan gunakan lipstik berwarna gelap seperti merah tua atau ungu.

2. Putih Pucat

Kulit pucat ini nampak lebih putih dari warna kulit bule. Pemilik lipstik ini bisa memilih

warna lipstik bernuansa pastel atau warna yang kalem.

Bila ingin menggunakan warna terang, seperti oranye, biru, atau merah terang. Warna-warna tersebut dapat dipakai untuk memberi kesan mewah.

3. Kulit Kuning Langsung

Kulit kuning langsung ditandai dengan warna kulit yang cerah dengan pigmen kuning yang cukup terlihat. Pigmen kuning ini lah yang membuat pemilik kulit kuning langsung terlihat cerah, segar, dan tidak pucat.

Orang dengan warna kulit kuning langsung ini sangat cocok bila memilih warna lipstik dark berry, red cherry, orange bata, warna merah maroon juga cocok untuk warna kulit yang satu ini. Jangan memilih warna lipstik yang warnanya nude karena membuat riasan menjadi

pucat dan kusam.

4. Kulit Sawo Matang

Baebellines yang memiliki warna kulit sawo matang dapat memakai warna lipstik apapun, seperti lipstik yang berwarna merah, merah muda, bahkan ungu muda menjadi beberapa pilihan populer untuk jenis warna kulit ini.

5. Kulit Gelap

Salah satu keuntungan orang yang berwarna kulit gelap adalah mudah memilih warna lipstik yang berwarna cerah maupun gelap. Warna merah maupun merah tua cocok untuk kulit yang gelap karena memberi kesan yang elegan. (nei,ist/dya)



Kabinet Prabowo ... (dari Hal 1)

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mengindikasikan ada banyak menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masuk ke dalam kabinetnya nanti. Prabowo menyebutkan, hal itu baru ia sadari saat sedang menyusun formasi kabinetnya.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat, banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang ya. Banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang (Jokowi), gitu," ujar Prabowo di acara BNI Daily Investor, JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo lantas mengeklaim bahwa ia tidak mempertimbangkan latar belakang seseorang untuk dipilih sebagai menteri. Tetapi kemampuan orang itu untuk bekerja kepada bangsa dan rakyat.

Oleh sebab itu, ia mengaku akan menunjuk orang-orang terbaik sebagai menteri seperti tim sepak bola yang pasti mencari pemain terbaik untuk membela timnya.

"Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu enggak dia deliver, mampu enggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Jokowi pun pasti mencari orang terbaik untuk masuk ke dalam kabinetnya. Oleh karena itu, menteri-menteri di kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung pada kabinet mendatang.

"Kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi," kata Prabowo.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketum Gerindra yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah memanggil calon-calon menteri.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak termasuk saya ya," kata Muzani di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Muzani mengatakan ada menteri dari kabinet Indonesia Maju yang dipanggil Jokowi. Namun dia tak menyebutkan detail siapa menteri di kabinet Jokowi yang sudah dipanggil Prabowo. "Setahu saya ada (menteri Jokowi)," ujarnya.

Muzani memastikan kabinet Prabowo akan diisi tokoh-tokoh berkualitas. Muzani membocorkan nama Mensesneg Pratikno juga ada di kabinet Prabowo yang tengah disusun.

"Kan Pak Prabowo udah ngomong nama-nama yang, nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau.

Jadi ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai," kata dia.

"Saya nggak paham satu per satu, setahu saya ada," sambungnya saat ditanya apakah ada nama Pratikno dalam daftar calon menteri di kabinet Prabowo.

Bocoran juga datang dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia menyinggung soal komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Dia meyakini, menteri ekonomi kabinet Prabowo adalah menteri lama untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin dan Ma'ruf Amin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi, insyaallah kalau katakanlah dipercaya menteri-menteri ekonominya masih menteri lama. Katakanlah begitu contohnya," ujar Bahlil saat menyampaikan special remarks dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bahlil mengatakan, keberlanjutan merupakan kunci agar pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 7% hingga 8%. Salah satu strateginya, kata Bahlil, telah dijalankan oleh Kementerian ESDM dengan merancang peta jalan untuk mengoptimalkan hilirisasi.

Dia menyebut, hilirisasi harus dioptimalkan karena merupakan salah satu instrumen untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun kini tak hanya mendorong hilirisasi dari sektor mineral dan batu bara.

Namun, pemerintah juga telah membuat master plan 20 sektor komoditas lainnya untuk hilirisasi meliputi, perikanan, perhutanan, hingga pertanian.

Apabila peta jalan hilirisasi ini dapat dioptimalkan, kata Bahlil, maka Indonesia akan masuk sebagai negara penghasil GDP terbesar nomor 10 di dunia.

Kemudian Bahlil menegaskan, keberlanjutan menjadi kunci Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, ini namanya program berkelanjutan dan ini bukan omon-omon, ibarat rumah ibarat pesawat rumah rumah itu bukan baru pembebasan lahan, tetapi lahannya sudah tiangnya sudah fondasinya sudah tinggal dipikirkan bentuk kecantikan kamar-kamarnya. Itu secara logikanya," paparnya.

Bahlil pun mengajak kepada seluruh pihak untuk optimistis karena pemerintah Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir telah membangun fondasi kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jauh melebihi 5%.

"Kita harus optimistis. Kita sudah melewati krisis covid, covid saja bisa kita lewati dengan baik, apalagi tidak covid. Nah, kepercayaan ini yang harus dilakukan," ujar Bahlil.

Saat ini, menteri koordinator bidang perkonomian dijabat oleh Airlangga Hartarto. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan sejumlah kementerian.

Kementerian yang dimaksud, yakni Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Kementerian Ketenagakerjaan (Ida Fauziah), Kementerian Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita), Kementerian Perdagangan (Zulkifli Hasan), Kementerian Pertanian (Amran Sulaiman), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Agus Harimurti Yudhoyono), Kementerian BUMN (Erick Thohir), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Teten Masduki).

Diketahui, residen Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto makan malam dan berdiskusi selama lebih dari dua jam di restoran Hutan Kota Plataran, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada Selasa (8/10/2024). Spekulasi yang beredar, keduanya membicarakan PDIP.

Sinyal PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo menguat sering santernya wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan kemungkinan persamuhan itu akan berlangsung di antara 12 dan 15 Oktober 2024.

Namun Gubernur Sulawesi Utara ini belum bisa memastikan apakah PDIP akan mendapatkan posisi menteri di Kabinet Prabowo. Olly juga mengatakan akan memberi tahu nanti soal tempat pertemuan Prabowo dan Megawati. "Pada prinsipnya kan kami, Ibu udah ngomong kami mendukung Pemerintahan Prabowo," katanya.

Tanggapan Parpol soal Jatah Menteri

Sejumlah parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menyusun kabinetnya.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya menghormati hak prerogatif Prabowo memilih menteri.

"PAN akan bekerja penuh membantu Pak Prabowo di pemerintahan," kata Viva Rabu (9/10/2024).

Tiga petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo bercerita PAN akan mem-

peroleh jatah lima kursi di kabinet pemerintahan mendatang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas disinyalir akan memberikan tiga kursi menteri di antaranya untuk calon yang didukung oleh seorang pengusaha besar.

Sedangkan dua kursi lainnya untuk kader PAN. Zulkifli telah menyerahkan nama-nama calon menteri yang diusulkan partainya kepada Prabowo. Viva enggan menjawab siapa saja kader PAN yang disorongkan menjadi Menteri Prabowo di pemerintahan mendatang. "Yang memiliki kapasitas, integritas, dan mau bekerja untuk negara," ujarnya.

Namun sejumlah narasumber di internal PAN dan partai yang tergabung di KIM menyebutkan calon menteri dari partai berlogo matahari putih itu adalah Zulhas dan Yandri Susanto.

Menurut Viva, Prabowo dan para ketua umum partai di KIM serta anggota dewan pakar akan menggodok bersama nama-nama calon yang akan ditunjuk sebagai menteri.

Sementara, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, mengatakan Demokrat menyatakan menghormati dan bakal mendukung keputusan Prabowo dalam penentuan komposisi kabinet pemerintahan mendatang. Demokrat menegaskan siap membantu Prabowo dalam memerintah.

Dia menuturkan, sejak awal, tujuan Demokrat adalah membantu pemenangan Prabowo di pemilihan presiden. Setelah tujuan itu dicapai, maka yang harus dilakukan adalah memastikan dukungan bagi Prabowo terus berjalan sesuai dengan koridor.

"Soal kabinet, jatah menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo. Kita posisinya membantu dan mendukung pemerintahan," kata Andi.

Mengenai usulan nama kader, Andi mengatakan hal itu menjadi ranah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun dia memastikan siapa pun kader Demokrat yang diusulkan atau diminta Prabowo untuk masuk dalam kabinet adalah mereka yang memiliki kapasitas mumpuni.

Namun, kata Andi, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai usulan nama dan permintaan dari Prabowo kepada partai. Dia mengatakan, pada prinsipnya, Demokrat akan selalu siap mengabdikan untuk bangsa dan negara melalui dukungan kepada Prabowo di pemerintahan mendatang.

"Sekali lagi, soal tawaran dan usulan itu ranahnya Pak Prabowo dan Mas AHY. Kami kader siap mendukung penuh," ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. (wid, ant, tmp, kum, ist/dya)



Pimpinan DPRD Surabaya 2024-2029 Resmi Ditetapkan, Adi Sutarwijono Kembali Jadi Ketua

SURABAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi menetapkan pimpinan definitif untuk periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (9/10/2024). Penetapan ini menjadi langkah awal bagi DPRD untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan menjadi fondasi kerja mereka selama periode tersebut.

Diketahui, empat pimpinan itu adalah Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD Surabaya dari PDIP, sementara tiga wakilnya Bahtiyar Rifai dari Partai Gerindra, Arif Fathoni dari Partai Golkar, dan Laila Mufidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penetapan ini berdasarkan SK Penetapan DPRD Kota Surabaya, berdasarkan SK DPP PDIP Nomor 7038/IN/DPP/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 mengenai pimpinan DPRD Kota Surabaya.

"Hari ini, Rapat Paripurna hanya memiliki satu agenda, yakni pengusulan penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya," kata Adi Sutarwijono kepada wartawan usai rapat paripurna.

Pria yang kerap disapa Awi itu menjadi pimpinan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya dalam dua periode. Awi sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya periode 2019-2024. Dilanjutkan pada periode 2024-2029 saat ini. Diketahui, kader banteng itu menjadi wakil rakyat di periode 2009-



Empat pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya (Kiri ke kanan) Bahtiyar Rifai, Adi Sutarwijono, Pjs Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani, Laila Mufidah, dan Arif Fathoni yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (9/20/2024). (Amanah/ Lenteratoday)

2014, lalu kembali ke kursi DPRD pada periode 2014-2019.

Terkait tahap selanjutnya, Awi menjelaskan, dilakukan pengiriman berkas hasil rapat paripurna kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) melalui Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.

"Kami sudah komunikasi dengan Ibu Novi, Pjs Wali Kota, untuk dibantu agar surat pengesahan dari Pj Gubernur Jawa Timur segera turun. Kemudian kami segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," jelasnya.

Saat ditanya mengenai target penyelesaian AKD, dijelaskan pihaknya berupaya agar hal ini bisa dis

lesaikan secepat mungkin. "Secepat-cepatnya," kata Adi.

Setelah surat pengesahan turun, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan Rapat Paripurna kembali untuk pengucapan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Surabaya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pjs Wali Kota Surabaya yang mendukung kelancaran proses penetapan pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut. "Kami berterima kasih sekali mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Pjs Wali Kota Surabaya," katanya.

Di kesempatan yang sama, Pjs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut baik penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut.

"Pemkot Surabaya tentunya bersyukur bahwa hari ini sudah ada calon, mereka ini saya bilang orang-orang pilihan dan terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua," kata Restu Novi.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini agar segera disahkan oleh Pj Gubernur Jawa Timur. "Lebih cepat, lebih baik. Setelah pengesahan, para pimpinan DPRD bisa langsung bekerja untuk masyarakat Surabaya," tambahnya.

Pada sisi lain, Pjs Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintahan

tetap berjalan dengan baik, meskipun pimpinan definitif belum sepenuhnya disahkan. "Pelayanan prima tetap kami ciptakan dan tidak terganggu," ujarnya.

Arif Fathoni: AKD Siap Disahkan

Sementara itu, Calon Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni berharap Pj Gubernur Jawa Timur bisa segera menandatangani surat keputusan pengesahan pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya.

"Sehingga kami bisa segera membentuk alat kelengkapan DPRD Surabaya. Mulai dari komisi, badan musyawarah, dan lain-lain. Sehingga mudah-mudahan di Minggu depan DPRD Kota Surabaya sudah bisa bekerja melayani masyarakat sesuai dengan fungsi-fungsi yang diemban masing-masing komisi," harapnya.

Fathoni menjelaskan, jika alat kelengkapan dewan (AKD) dalam surat edaran Mendagri selambat-lambatnya disahkan 12 hari setelah SK penetapan diajukan.

Bahkan, ia menyebut, nantinya pihaknya akan membentuk AKD terlebih dulu. Setelah itu, komisi-komisi akan melaksanakan tugasnya seperti menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, dan lain-lain.

"Itu nanti akan diputuskan di badan musyawarah DPRD Surabaya ketika AKD sudah dibentuk," jelasnya.

Fathoni juga menuturkan, nantinya formasi pengisian AKD akan dibagi rata kepada semua partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Surabaya.

"Karena AKD konsensus semua parpol. Dan kami memahami prinsip proposional itu, jadi semua parpol pemilik kursi di parlemen harus mendapatkan pos di kelengkapan dewan itu. Jadi begitu pengucapan sumpah dan janji sudah terlaksana, maka AKD bisa disahkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama ketua parpol pemilik kursi di DPRD Surabaya," tukasnya. (Adv,Ama/Dya)

